

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga agar segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

6.1. Strategi Umum

Secara umum strategi yang ditempuh dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian yaitu: a) strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh, b) strategi penataan kembali Kabupaten Musi Rawas, c) memperkuat strategi antar urusan dan pengarusutamaan, dan d) memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan.

6.1.1. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rakyat dan Penciptaan Landasan Pembangunan yang Kokoh

Strategi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk membangun Kabupaten Musi Rawas di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan UUD 1945 terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Strategi-strategi pembangunan Kabupaten Musi Rawas, diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan kebutuhan dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Kebutuhan dasar rakyat adalah dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan. Kebutuhan dasar selama ini sudah mulai diperhatikan bukan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan, namun demikian untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar, agenda lima tahunan akan secara tegas dan jelas betul-betul menjadikan agenda utama pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015.

Landasan yang kokoh diperlukan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan generasi mendatang yang lebih baik. Ruang gerak bagi kehidupan yang lebih baik tersebut akan semakin terbuka apabila ekonomi stabil, mandiri, dan tumbuh dengan cepat; ada jaminan dan kepastian hukum serta aturan-aturan; serta kapasitas diri dan kualitas kehidupan warga masyarakat yang meningkat. Pada lima tahun belakangan ini, pengakuan akan hak dasar rakyat di Kabupaten Musi Rawas mulai mengalami peningkatan. Pembangunan tidak semata-mata menekankan pada pencapaian dan pengejaran pertumbuhan ekonomi, tetapi mulai memperhatikan keadilan dan pemenuhan hak dasar politik dan sosial rakyat. Untuk itu strategi pembangunan diarahkan pada upaya untuk terus melakukan peningkatan pemenuhan hak dasar, meliputi: (1) Hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam politik dan perubahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; serta (10) Hak rakyat

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju Kabupaten Musi Rawas berbasis teknologi, dirancang agar setiap pejabat, tokoh masyarakat maupun segenap lapisan masyarakat tidak lagi gagap teknologi. Teknologi bukan lagi barang mewah, tetapi sarana untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, produktivitas dan alat komunikasi yang ampuh. Dengan penerapan teknologi komunikasi, maka dijamin terjadinya pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Musi Rawas tanpa dibatasi oleh tertuang dan waktu.

6.1.2. Strategi Penataan Kembali Kabupaten Musi Rawas

Penataan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah berhasil mengantarkan layanan yang simpel, efektif dan efisien. Strategi Penataan Kembali Kabupaten Musi Rawas secara makro dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk mendukung penyelamatan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; UUD 1945 (terutama Pembukaan UUD 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

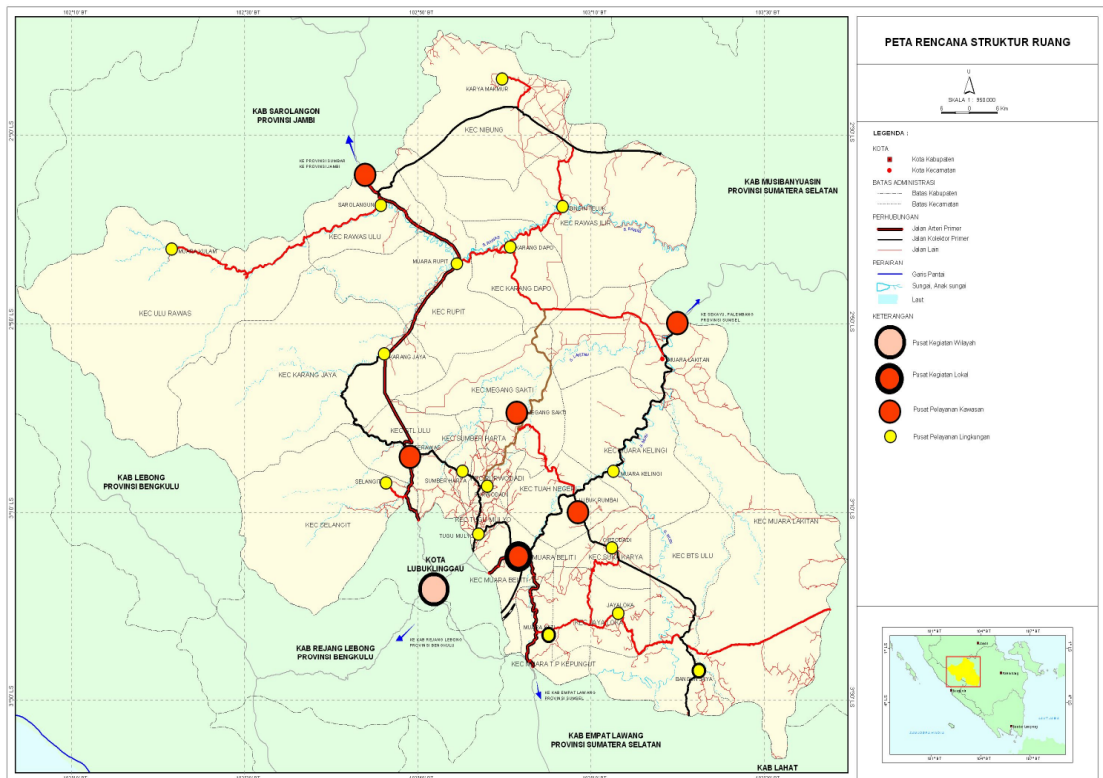
Strategi ini dimaksudkan untuk membangun demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yaitu demokrasi yang mengandung elemen tanggungjawab, di samping hak. Penekanan yang berlebihan dengan tanggungjawab dapat menciptakan masyarakat yang kerdil, tertekan, tidak kreatif, dan pada akhirnya melahirkan perlawanan. Strategi pembangunan ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan sistem sosial politik yang tangguh sehingga sistem dan kelembagaan ketatanegaraan yang terbangun tahan menghadapi berbagai goncangan sebagai suatu sistem sosial politik yang berkelanjutan. Di atas landasan sistem sosial politik yang berkelanjutan tersebut dikembangkan sistem peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang merupakan bagian penting dari strategi pembangunan kedua. Sesuai amanat konstitusi, peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat harus dilakukan melalui penyediaan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Dalam strategi ini, ke depan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan tegas mendukung: (1) Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 tidak lagi diperdebatkan; (2) Bentuk Negara tetap merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang Negara harus dihayati dan dipraktekkan; (4) Pemerintahan dipilih dan diberhentikan melalui proses Pemilihan Umum yang demokratis oleh rakyat secara langsung; (5) Seluruh undang-undang harus dijiwai oleh semangat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dan undang-undang hendaknya disusun dan diajukan dengan sejauh mungkin melalui proses debat publik; (6) Seluruh peraturan hendaknya tidak melanggar perundangan dan peraturan yang lebih tinggi dan harus mengacu pada jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945; (7) Dihindari perundangan dan peraturan yang diskriminatif terhadap warga negara; (8) Nilai-nilai luhur yang telah ada dimasyarakat terus diperkuat untuk menghindari pemaksaan individu oleh individu lain atau pemaksaan golongan oleh golongan lain dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang telah disepakati bersama; serta (9) Negara harus menjaga dan menghormati hak-hak asasi warga negaranya.

Terkait dengan penataan kembali Kabupaten Musi Rawas maka perlu dilakukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah dilakukan mengingat wilayah Kabupaten Musi Rawas sangat luas mencapai 1.236.582,66 Ha. Sementara itu penduduknya tersebar tidak merata, hanya terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan saja dan sebagian kecil berada jauh dari pusat pelayanan pemeritahan diperdesaan. Sesuai dengan makna otonomi daerah yaitu untuk mendekatkan

Sedangkan secara spasial kebijakan pembangunannya dengan mengacu kepada RTRW Kabupaten Musi Rawas tahun 2008-2028, yang teruang dalam rencana struktur dan pola ruang kabupaten Musi Rawas, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 6.1 dan gambar 6.2. berikut ini:

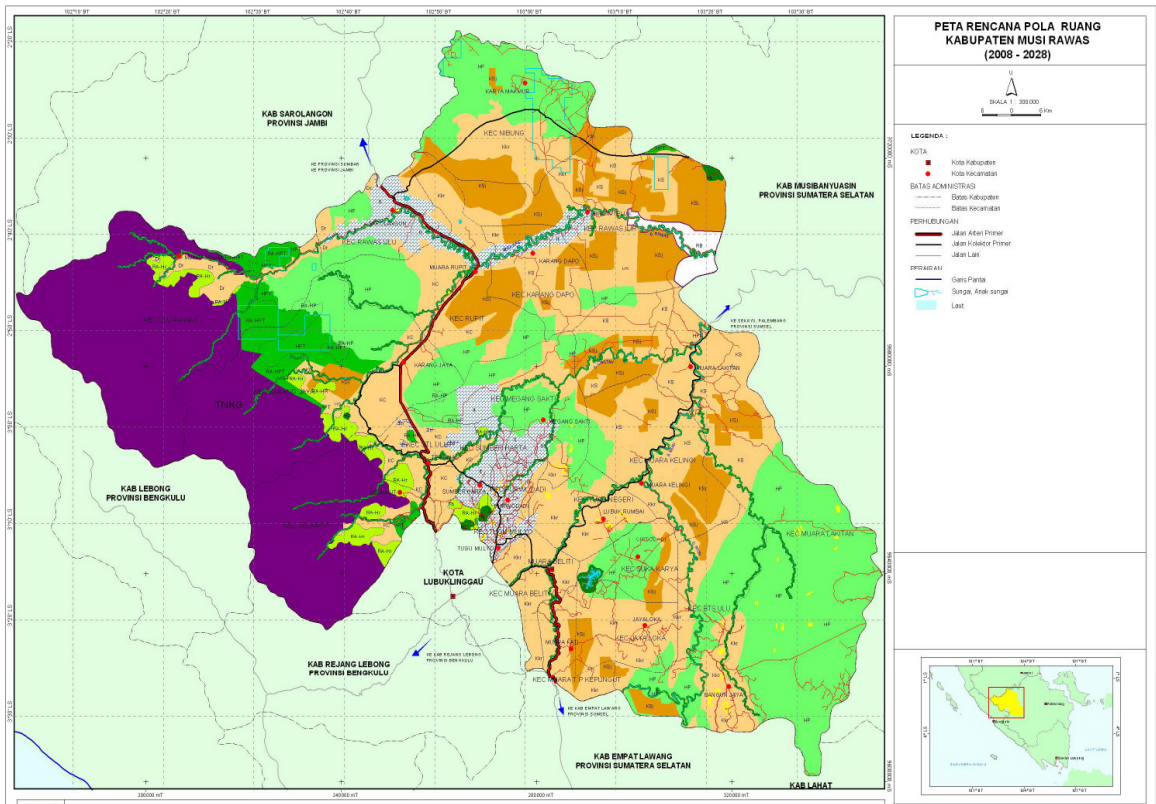
Gambar 6.1.



6.1.3. Memperkuat Strategi Antar Urusan dan Pengarusutamaan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat lima tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan sinergi antar urusan pemerintahan daerah.

Gambar 6.2.
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Rawas



Sinergi antar urusan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015 pada dasarnya mengacu pada konsep bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditopang oleh sinergi kebijakan, program prioritas dan hasil dari semua urusan dan dukungan para pemangku kepentingan. Dalam kerangka keterpaduan antar urusan, maka prinsip-prinsip pengarusutamaan menjadi landasan berpijak bagi seluruh pembangunan urusan pemerintahan daerah. Pengarusutamaan dilakukan dengan struktur kriteria sebagai berikut: (1) Pengarusutamaan bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pemangunan urusan; (2) Pengarusutamaan tidaklah mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan, dan (3) Pengarusutamaan dilakukan pada semua urusan terkait, namun diprioritaskan pada urusan penting yang terkait dengan isu-isu pengarusutamaan. Terkait dengan hal tersebut, pengarusutamaan di Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015 diprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan, Pembangunan berkelanjutan dalam Kerangka Membangun Musi Rawas sebagai Lumbung Pangan, dan Gender.

6.1.4. Memperkuat strategi Penanggulangan Kemiskinan

Penyusunan Program Lintas SKPD dalam pengentasan kemiskinan dimaksudkan sebagai dasar atau acuan dalam menyusun Kebijakan pengentasan kemiskinan tahun 2010 - 2015. Langkah-langkah penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, sehingga dapat mengurangi beban dan tetap mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penyusunan program lintas SKPD dalam penanggulangan kemiskinan didasarkan pada:

1. Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium;
2. Untuk meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integritas berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan penyusunan program lintas SKPD di daerah.
3. Penguatan kelembagaan yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan baik di tingkat Pusat maupun Daerah dengan menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 – 2015 perlu disusun program lintas SKPD terkait dengan kemiskinan didasarkan pada hasil musrenbang pada setiap tahunnya. Penyusunan program lintas SKPD pengentasan kemiskinan bertujuan untuk memberi arah dan sasaran pembangunan pengentasan kemiskinan, sehingga dapat diaplikasikan oleh semua *stakeholder*.

Dengan demikian, maka penyusunan program lintas SKPD dalam pengentasan kemiskinan terpadu diharapkan mampu memberikan arah kebijakan pokok pembangunan pengentasan kemiskinan sebagaimana Visi dan Misi serta prioritas program tahun 2010 - 2015 sehingga setiap SKPD, maupun *stakeholder* dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan Musi Rawas yang berdaya guna dan berhasil guna menuju masyarakat Musi Rawas yang serasi.

Gambar 6.3.
Program Lintas SKPD



6.1.4.1. Pengarusutamaan Pembangunan berkelanjutan dalam Kerangka Membangun Bumi Agropolitan

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh Bupati dan Wakil Bupati sangat tampak dalam tema pembangunan yaitu: **Musi Rawas Bumi Agropolitan, Musi Rawas Kawasan Pertambangan dan Musi Rawas Darussalam**.

Gerakan Pembangunan Masyarakat menuju **Musi Rawas Bumi Agropolitan, Musi Rawas Kawasan Pertambangan dan Musi Rawas Darussalam** bukanlah gerakan instan, melainkan gerakan berkelanjutan dengan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan lima tahun terdahulu, membenahi hal-hal yang belum tercapai dan meningkatkan hasil yang sudah baik. Dalam rangka pelaksanaan **Musi Rawas Bumi Agropolitan, Musi Rawas Kawasan Pertambangan dan Musi Rawas Darussalam** juga mengamanatkan bahwa eksploitasi berlebihan sumberdaya harus dihindari sehingga daya dukung sumberdaya alam dapat dipertahankan terus menerus.

Konsep yang dilaksanakan dalam mewujudkan Musi Rawas sebagai Lumbung Pangan adalah Pembangunan Agropolitan, Agroindustri dan Agrobisnis. Strategi pembangunan agropolitan, agroindustri dan Agrobisnis di Musi Rawas diuraikan sebagai berikut :

Dalam rangka mendorong para petani senang berusaha tani, pertanian didorong dan diwujudkan sebagai pekerjaan yang menjanjikan, bukan pekerjaan subsistem. Untuk itu, Kabupaten Musi Rawas merancang kota satelit agropolitan. Agropolitan adalah suatu konsep pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengembangkan segala aspek kehidupan sosial (pendidikan, kesehatan, seni-budaya, politik, pertahanan-keamanan, kehidupan beragama, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari kesenjangan desa-kota. Agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan lintas kewilayahan yang memiliki kekhasan untuk dikembangkan dalam satu kegiatan pertanian terpadu terintegrasi dengan kegiatan bisnis dan sektor industri yang terpusat .

Secara luas pengembangan agropolitan berarti mengembangkan perdesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota / modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan, sehingga dapat mengurangi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mereka terdorong untuk tinggal di tempat dan menanamkan modal di daerah perdesaan, karena kebutuhan-kebutuhan dasar (lapangan kerja, akses permodalan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan kebutuhan sosial-ekonomi lainnya) telah dapat terpenuhi di desa. Hal ini dimungkinkan, karena desa telah diubah menjadi bentuk campuran yang dinamakan **agropolis** atau kota di ladang.

Pada dasarnya kawasan Agropolitan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) mempunyai skala ekonomi yang besar, sehingga produktif untuk dikembangkan;
- (2) mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang;
- (3) memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah yang berbasis pertanian sebagai sumber bahan baku;
- (4) memiliki produk-produk unggulan yang mempunyai pasar yang jelas dan prospektif dan
- (5) memenuhi prinsip-prinsip efisiensi ekonomi untuk menghasilkan output yang maksimal.

Sedangkan agroindustri adalah kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut, sehingga menjadi produk jadi dan siap untuk dikonsumsi, atau produk antara dan siap untuk proses lebih lanjut.

Pengembangan agrobisnis dan agroindustri diperlukan agar tercipta keterkaitan yang erat antara sektor pertanian dengan kegiatan bisnis dan sektor industri, sehingga proses transformasi struktur perekonomian berjalan dengan baik, seimbang dan efisien sehingga sektor pertanian tumbuh menjadi lebih kuat. Struktur perekonomian seimbang terwujud dengan ciri-ciri sebagai

berikut, yaitu : (1) Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan pendapatan daerah secara relatif menurun, sedangkan sektor-sektor diluar sektor pertanian mengalami kenaikan terutama untuk sektor industri; (2) Penyerapan tenaga kerja secara relatif menurun sedangkan sektor-sektor di luar sektor pertanian mengalami kenaikan; (3) Sektor pertanian mampu menyediakan bahan pangan untuk kebutuhan nasional; (4) Sektor pertanian mampu menyediakan bahan baku untuk keperluan industri daerah dan (5) Produktifitas tenaga kerja disektor pertanian relatif sama besarnya dengan produktifitas tenaga kerja di luar sektor pertanian.

6.1.4.2. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas merupakan strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dn perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan. Pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembagian tugas yang seimbang antara laki dan perempuan.

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun strategi pembangunan Musi Rawas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati adalah sebagai berikut:

- a) **Misi I** : Pembangunan Kultur Darussalam, strategi yang ditempuh untuk mewujudkan misi ini adalah:
 - Peningkatan kualitas kehidupan beragama
 - Peningkatan kerukunan antar umat beragama
 - Penguatan kultur Darussalam
- b) **Misi II** : Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial, strategi yang ditempuh untuk mewujudkan misi ini adalah:
 - Penanggulangan kemiskinan
 - Peningkatan pelayanan pendidikan
 - Peningkatan pelayanan kesehatan
 - Pembangunan perdesaan dan pemberdayaan KAT
 - Penciptaan perlindungan dan tanggung jawab sosial kemitraan
 - Peningkatan pemberdayaan perempuan
 - Peningkatan kapasitas ketenagakerjaan dan kependudukan
 - Peningkatan peran pemuda dan olah raga
- c) **Misi III** : Pengembangan Agropolitan, strategi yang ditempuh untuk mewujudkan misi ini adalah:
 - Revitalisasi pertanian
 - Pengembangan infrastruktur agropolitan dan kawasan cepat tumbuh

- Pengembangan komoditas unggulan dan pasar
 - Penguatan kelembagaan kemitraan pertanian
 - Pengembangan industri pertanian
 - Peningkatan ketahanan pangan dan swasembada berkelanjutan
 - Peningkatan kemandirian dan daya beli petani
- d) **Misi IV** : Pengembangan Pertambangan dan Lingkungan, strategi yang ditempuh untuk mewujudkan misi ini adalah:
- Pengembangan kelistrikan
 - Penataan kegiatan penambangan
 - Pengelolaan berwawasan lingkungan
 - Peningkatan fungsi penataan ruang
 - Pengembangan akses khusus pertambangan
 - Percepatan kemandirian energi
- e) **Misi V** : Penguatan Investasi dan Daya Saing, strategi yang ditempuh untuk mewujudkan misi ini adalah:
- Peningkatan pelayanan perizinan
 - Penciptaan kepastian hukum dan ketertiban umum
 - Pengembangan infrastruktur dasar dan strategis
 - Pemberdayaan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Industri
 - Pengembangan Pariwisata dan Budaya
 - Pengembangan Jaringan Pasar dan Promosi, Pembiayaan dan Permodalan
 - Peningkatan Peran BUMD
- f) **Misi VI** : Penataan Pemerintahan dan SDM, strategi yang ditempuh untuk mewujudkan misi ini adalah:
- Peningkatan Pelayanan Publik
 - Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Budaya Kerja
 - Penguatan Lembaga Kemitraan
 - Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan
 - Percepatan Pengembangan Wilayah

Hubungan antara setiap strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan disajikan pada tabel 6.1. di bawah ini.

Tabel 6.1.
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

Visi: Terwujudnya Bumi Agropolitan dan Kawasan Pertambangan menuju Musi Rawas Darussalam			
Misi I. Pembangunan Kultur Darussalam			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan inter dan antar umat beragama	1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama	1. Peningkatan semangat dan prilaku masyarakat dalam beragama
			2. Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga keagamaan
			3. Optimalisasi pemanfaatan rumah ibadah
	2. Meningkatnya toleransi kehidupan inter dan antar umat beragama	1. Peningkatan kerukunan antar umat beragama	4. Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama
			1. Penanaman wawasan Darussalam di sekolah
			2. Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat integritas sosial masyarakat;
			3. Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi terjadinya konflik secara dini;
			4. Pencegahan konflik sosial yang berlatar belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki;
2. Meningkatkan percontohan dan peneladan karakter darussalam	1. Meningkatnya percontohan dan peneladan karakter darussalam	1. Penguatan kultur darussalam	1. Penanaman kultur darussalam di dalam kelompok-kelompok keagamaan
			2. Peningkatan koordinasi teknis dengan lembaga terkait dalam rangka sosialisasi dan himbauan penunaian zakat penghasilan.
Misi 2. Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial			
1. Meningkatkan kesejahteraan sosial	1. Menurunnya angka kemiskinan	1. Penanggulangan kemiskinan	1. Peningkatan akses penduduk terhadap transportasi, listrik, informasi, komunikasi, air bersih, serta pasar dan modal
			2. Pemenuhan hak atas pangan
			3. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan usaha
			4. Pemenuhan hak atas rasa aman
			5. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin, pendidikan rendah, terpencil, dan tidak terdaftar
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	1. Peningkatan pelayanan pendidikan	1. Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini
			2. Menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu

			3. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara
			4. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan melalui jalur formal dan non formal
			5. Menyusun Peraturan Daerah tentang pelajaran budi pekerti, akidah, akhlak dan ibadah sebagai muatan lokal di setiap jenjang pendidikan dalam rangka pembinaan akhlak mulia
			6. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan komitmen dalam melaksanakan tugas pengajaran
			7. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan
			8. Meningkatkan peran serta mitra kerja Dinas Pendidikan dalam pembangunan pendidikan
			9. Meningkatkan pengembangan pendidikan tinggi (Universitas Musi Rawas)
			10. Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan.
		2. Peningkatan pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
			2. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas terutama di daerah kurang diminati dan rawan bencana.
			3. Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin.
			4. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup bersih dan sehat.
			7. Penataan dan pengembangan sistem informasi kesehatan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kesehatan melalui pengaturan sistem informasi yang komprehensif dan pengembangan jejaring.
			8. Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif
			9. Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk mencapai indikator SPM.
			10. Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran
2. Meningkatkan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan KAT	1. Meningkatnya pembangunan perdesaan dan pemberdayaan KAT	1. Pembangunan perdesaan dan pemberdayaan KAT	1. Pengembangan ekonomi wilayah di wilayah tertinggal dan perbatasan
			2. Peningkatan diversifikasi ekonomi perdesaan
			3. Peningkatan infrastruktur perdesaan
			4. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan kelembagaan di tingkat perdesaan dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan menjawab persoalan-persoalan dalam masyarakat
			5. Memaksimalkan pengelolaan, pemanfaatan dan penguasaan teknologi tepat guna sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna pengembangan potensi ekonomi perdesaan

			6. Meningkatkan pembinaan kelembagaan desa dan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat perdesaan 7. Pelayanan sosial yang berorientasi pada peningkatan kemampuan, pemberdayaan, kemandirian dan keberlanjutan KAT 8. Perlindungan dan jaminan sosial kepada KAT
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial	1. Terciptanya perlindungan dan tanggung jawab sosial kemitraan	1. Penciptaan perlindungan dan tanggung jawab sosial kemitraan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 2. Memberikan peluang kepada PMKS untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya 4. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial 5. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial 6. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya 7. Mengembangkan sistem perlindungan sosial daerah 8. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial 9. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial; 10. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.
	2. Meningkatnya kapasitas ketenagakerjaan dan kependudukan	1. Peningkatan kapasitas ketenagakerjaan dan kependudukan	1. Peningkatan perencanaan dan system informasi ketenagakerjaan dan kependudukan 2. Peningkatan SDM melalui diklat teknis dan fungsional; 3. Peningkatan dan pengembangan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 4. Peningkatan dan pendayagunaan fasilitas latihan melalui kerjasama pihak ke III 5. Peningkatan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta mengeliminir eksese – eksese negatif yang timbul akibat kebijakan ini 6. Pembinaan kewirausahaan dan pengembangan produktivitas serta kegiatan padat karya produktif 7. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja di perusahaan 8. Membangun hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha dan pemerintah
4. Meningkatkan pemberdayaan perempuan	1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan	1. Peningkatan pemberdayaan perempuan	1. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan pemahaman konsep gender dan perlindungan perempuan dan anak dari KDRT
5. Meningkatkan peran pemuda dan olah raga	1. Meningkatnya peran pemuda dan olah raga	2. Peningkatan peran pemuda dan olah raga	2. Membentuk pemuda mandiri, kreatif dan semangat kebangsaan yang tinggi 3. Peningkatan prestasi olahraga dan pemasyarakatan olahraga sebagai salah satu alternatif hidup sehat.

Misi 3 Pengembangan Agropolitan			
1. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemasaran produk pertanian	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk pertanian 2. Meningkatnya kualitas komoditas unggulan dan pasar 3. Terwujudnya industri pertanian	1. Revitalisasi pertanian 2. Pengembangan komoditas unggulan dan pasar 3. Pengembangan industri pertanian	1. Peningkatan kapasitas SDM pertanian dan kelembagaan pendukungnya 2. Peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perikanan, Perkebunan) 3. Optimalisasi potensi sumberdaya lokal 4. Pengembangan jaringan pasar hasil pertanian 5. Penanganan pascapanen dan agroindustri
2. Mewujudkan infrastruktur agropolitan dan kawasan cepat tumbuh	1. Terwujudnya infrastruktur agropolitan dan kawasan cepat tumbuh	1. Pengembangan Infrastruktur Agropolitan dan Kawasan Cepat Tumbuh	1. Pengembangan irigasi skala besar (Air Lakitan dan Air Rawas) 2. Peningkatan jaringan jalan di kawasan cepat tumbuh di agropolitan center dan agropolitan distrik 3. Mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana jalan berbasis kawasan, khususnya agropolitan center dan agropolitan distrik 4. Pembangunan infrastruktur kawasan pusat pemerintahan 5. Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan center dan distrik
3. Memberdayakan kelembagaan kemitraan pertanian	1. Meningkatnya kinerja kelembagaan kemitraan pertanian	1. Penguatan Kelembagaan Kemitraan Pertanian	1. Penguatan kelembagaan mitra (<i>stakeholder</i>) bidang pengairan (P3A, GP3A, IP3A), bidang Alsintan (UPJA), bidang pengendalian Organisme pengganggu tanaman (RPH) dan bidang pendanaan (perbankan/keuangan dan lembaga lainnya)
4. Meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada berkelanjutan	1. Meningkatnya ketahanan pangan dan swasembada berkelanjutan	1. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Swasembada Berkelanjutan	1. Pemantapan swasembada beras melalui peningkatan produksi berkelanjutan 2. Peningkatan Pembangunan Sistem Ketahanan Pangan
5. Meningkatkan kesejahteraan petani	1. Meningkatnya kesejahteraan petani	1. Peningkatan Kemandirian dan Daya Beli Petani	1. Peningkatan pendapatan dan SDM petani
6. Mewujudkan kelestarian sumber daya hutan	1. Terwujudnya kelestarian sumber daya hutan	1. Revitalisasi Pertanian	1. Rehabilitasi lahan kritis 2. Pemantapan kawasan hutan 3. Peningkatan upaya perlindungan hutan
Misi 4 Pengembangan Pertambangan dan lingkungan Hidup			
1. Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Pertambangan yang berwawasan lingkungan	1. Meningkatnya pengelolaan pertambangan 2. Meningkatnya pengelolaan energi listrik 3. Meningkatnya Pengelolaan energi alternatif	1. Penataan kegiatan penambangan 2. Pengelolaan berwawasan lingkungan 3. Pengembangan akses khusus pertambangan 4. Peningkatan fungsi penataan ruang 1. Pengembangan kelistrikan 1. Percepatan kemandirian energi	1. Meningkatkan pelayanan publik dalam bidang perizinan usaha pertambangan, yang diharapkan mampu meningkatkan PAD sektor non migas 1. Peningkatan pengelolaan pertambangan dan energi melalui percepatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan yang berwawasan lingkungan 1. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pemda kabupaten dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka pembangunan dan pembiayaan 1. Peningkatan fungsi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang. 1. Percepatan pembangunan kelistrikan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan energi alternatif 1. Pengembangan energi alternatif

	4. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Pengelolaan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup. 2. Meningkatkan Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3. Meningkatkan koordinasi dan peran serta masyarakat.
Misi 5 Penguatan Investasi dan Daya Saing			
1. Meningkatkan iklim investasi	1. Meningkatnya pelayanan perizinan	1. Peningkatan pelayanan perizinan	1. Memfasilitasi pelayanan sarana dan prasarana pelayanan perizinan disesuaikan dengan manajemen standar pelayanan. 2. Menciptakan kepastian berinvestasi bagi pengusaha. 3. Meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan investasi sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM).
	2. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban umum	1. Penciptaan kepastian hukum dan ketertiban umum	1. Memfasilitasi percepatan pembuatan produk hukum regulasi perizinan dan investasi
	3. Terbangunnya infrastruktur dasar dan strategis	1. Pengembangan infrastruktur dasar dan strategis	1. Pembangunan infrastruktur dasar dan strategis guna meningkatkan kegiatan investasi
2. Meningkatkan kinerja koperasi, UMKM, perdagangan dan industri	1. Meningkatnya kinerja koperasi, UMKM, perdagangan dan industri	1. Pemberdayaan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Industri	1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah. 2. Memperkuat kelembagaan 3. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar lokal. 4. Membangun koperasi yang di arahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk : (i) Peningkatan status badan hukum koperasi, (ii) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi; (iii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) kepada koperasi; (iv) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.
3. Mengembangkan pariwisata dan budaya	1. Meningkatnya pariwisata dan budaya	1. Pengembangan Pariwisata dan Budaya	1. Mengembangkan, melestarikan, menggali dan mengembangkan Nilai-nilai Budaya 2. Mengembangkan kelembagaan berkreasi dalam berkesenian dengan tetap mengacu pada etika, moral, dan Agama serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap Karya cipta. 3. Memfasilitasi penggalian, pembinaan, pelestarian dan pengembangan Seni Budaya Lokal melalui penyediaan sarana dan prasarana. 4. Membentuk dan mengaktifkan Kelembagaan pengembangan Budaya Lokal. 5. Melaksanakan Explorasi Budaya dan Ekavasi Kepurbakalaan serta perkembangan Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional. 6. Pengembangan dan penataan Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW). 7. Menggali Obyek dan Daya Tarik Kepariwisata. 8. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung Kepariwisata. 9. Meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja dan sumber pendapatan daerah

4. Mengembangkan jaringan pasar dan promosi, pembiayaan dan permodalan	1. Terwujudnya jaringan pasar dan promosi, pembiayaan dan permodalan	1. Pengembangan Jaringan Pasar dan Promosi, Pembiayaan dan Permodalan	1. Mengembangkan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal berbasis e-government. 2. Mengembangkan jaringan pasar, pembiayaan dan permodalan.
5. Meningkatkan peran BUMD	1. Meningkatnya peran BUMD	1. Peningkatan Peran BUMD	1. Menciptakan lingkungan usaha yang sehat untuk meningkatkan peranan BUMD
Misi 6 Penataan Pemerintahan dan SDM			
1. Meningkatkan tata pemerintahan	1. Meningkatnya pelayanan publik	1. Peningkatan Pelayanan Publik	1. Reformasi birokrasi untuk menciptakan efisiensi pelayanan publik 2. Pengembangan sistem informasi terpadu (e-governance) yang dapat memperlancar dan meningkatkan mutu layanan 3. Membangun pelayanan satu titik (one stop services), untuk pelayanan publik, sehingga dapat mewujudkan pelayanan efektif dan efisien.
	2. Meningkatnya kerjasama dengan lembaga kemitraan	1. Penguatan Lembaga Kemitraan	1. Penguatan kemitraan antara industri hulu dan hilir 2. Membangun kemitraan dengan daerah lain yang menghasilkan komoditas yang sama dan dapat memberikan nilai tambah yang tinggi
	3. Terwujudnya pusat pemerintahan	1. Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan	1. Mempercepat penyelesaian pembangunan pusat pemerintahan di Muara Beliti
	4. Meningkatnya efisiensi pelayanan kepada masyarakat	1. Percepatan Pengembangan Wilayah	1. Penataan kembali Kabupaten Musi Rawas melalui pemekaran wilayah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan
2. Meningkatkan SDM aparatur	1. Meningkatnya SDM aparatur	1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Budaya Kerja	1. Peningkatan dan pengembangan profesionalisme tenaga kerja 2. Fasilitasi beasiswa bagi aparat untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi di dalam dan luar negeri

